



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKA PUSPITASARI
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 401081

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.824.013.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1295 m²/110 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.588.197.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1155 m²/110 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.077.416.000
3. Tanah Seluas 408 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 1.158.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 249.500.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 20 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA S1 GET 125 3V IE AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 33.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 74.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.522.500.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.301.018.599**F. HARTA LAINNYA** Rp. 709.000.000

Sub Total Rp. 9.680.281.599

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.680.281.599

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.